PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Amiruddin Pabbu¹, Richard Sikteubun², A. Try Tunggal Putra³
amiruddinpabbu4@gmail.com¹, ichalsikteubun@gmail.com², triaskar6@gmail.com³
Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan aman, serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa UU PPLH memberikan hak ganti rugi, rehabilitasi, dan pemulihan bagi korban pencemaran. Namun, pelaksanaan UU PPLH menghadapi kendala seperti keterbatasan penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi yang lebih baik, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

Environmental pollution is a serious problem that threatens human health and ecosystem balance. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) functions as the main legal basis in protecting people's rights to a healthy and safe environment, as well as stipulating obligations for business actors to maintain environmental sustainability. This study uses a qualitative approach with a normative juridical analysis method to explore legal protection for victims of environmental pollution. Research shows that the PPLH Law provides the right to compensation, rehabilitation, and restoration for pollution victims. However, the implementation of the PPLH Law faces obstacles such as limited law enforcement, lack of public awareness, and coordination problems between institutions. To overcome these challenges, it is necessary to increase the capacity of law enforcement, better coordination, and increase public awareness.

Keywords: *Legal Protectio, Environmental Pollution.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan. Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan hidup manusia. Dengan sumber daya alam, udara segar, air bersih, dan ekosistem yang seimbang, lingkungan hidup menjadi faktor penunjang keberadaan manusia. Masyarakat berhak untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan yang bersih dan sehat, hal ini merupakan landasan penting bagi terpenuhinya hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas kehidupan yang layak, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang berkualitas sangat terkait dengan kualitas hidup manusia, sehingga hak ini harus dilindungi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Nilai-nilai universal hak asasi manusia diterjemahkan ke dalam produk hukum nasional di setiap negara agar nilai-nilai kemanusiaan dapat terlindungi dan dihormati (Rahmadi, 2019).

Pencemaran lingkungan telah menjadi masalah serius bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Pencemaran lingkungan terjadi ketika bahan kimia, partikel, atau agen berbahaya lainnya masuk ke dalam lingkungan. Dampaknya tidak hanya pada kerusakan

alam, tetapi juga berdampak bagi kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan kerusakan harta benda dan hilangnya sumber pendapatan masyarakat, mengakibatkan penderitaan ekonomi yang signifikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan hukum utama dalam melindungi lingkungan hidup (Kurniawan, 2023). UU PPLH mengatur hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman serta menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. UU PPLH juga memberikan hak bagi korban pencemaran untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, pelaku pencemaran diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta tindakan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran di masa yang akan datang. Pelaksanaan kewajiban ini diawasi oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme penegakan hukum yang tersedia. UU PPLH juga mengatur tentang rehabilitasi dan pemulihan, di mana korban berhak mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi lingkungan hidup dan kesehatan mereka.

Prinsip tanggung jawab mutlak juga diterapkan dalam UU PPLH, dimana pelaku pencemaran bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Juga terdapat sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Sanksi bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mendorong perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan.

Implementasi UU PPLH menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti keterbatasan dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta masalah koordinasi antara berbagai lembaga dan tingkatan pemerintahan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan rasa takut melaporkan pelanggaran juga menjadi tantangan besar. Artikel ini membahas pertanyaan “Bagaimana Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Lingkungan Di Indonesia?”.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Fokus penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum korban pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap undang-undang, peraturan dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran serta memberikan jaminan bagi korban pencemaran lingkungan untuk mendapatkan hak-hak mereka (Bariun, 2019). UU PPLH memberikan hak-hak bagi korban pencemaran lingkungan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Ganti rugi tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Penyediaan hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban pencemaran lingkungan dapat memperoleh keadilan dan mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami (Samidu et al., 2022).

Hak-hak korban pencemaran lingkungan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Pelaku pencemaran lingkungan diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan serta memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pemulihan dan ganti rugi, tetapi juga tindakan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di masa depan. Pelaksanaan kewajiban ini diawasi dan ditegakkan oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme penegakan hukum, seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan gugatan perwakilan (Class Action).

Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Korban berhak mendapatkan bantuan untuk rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup serta kesehatannya. Pasal 85 UU PPLH mengatur tentang hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan guna mendapatkan perintah rehabilitasi lingkungan. Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, serta tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan di masa depan.

Pelaku pencemaran juga memiliki tanggung jawab mutlak berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak, yang berarti pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian (Nur et al, 2011:178). Pasal 88 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Langkah awal dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan adalah melalui sanksi administratif, yang mencakup serangkaian langkah seperti pembekuan izin lingkungan, pemberian teguran tertulis, tindakan paksa oleh pemerintah, serta pencabutan izin lingkungan. Tindakan administratif ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan yang diatur oleh regulasi lingkungan.

Pasal 76 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif. Bentuk-bentuk sanksi administratif ini meliputi teguran tertulis, tindakan paksa oleh pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan (Memah et al, 2020:138). Setelah sanksi administratif diberlakukan, langkah berikutnya adalah menerapkan sanksi perdata. Sanksi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, baik melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) atau di pengadilan (litigasi).

Penyelesaian di luar pengadilan melibatkan berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase, untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau tindakan tertentu guna memulihkan lingkungan (Rozi, 2018:38-39). Pasal 84 UUPPLH menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang melibatkan tuntutan biaya pemulihan dan/atau ganti rugi. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, diterapkan terhadap pelanggaran yang dianggap serius. Ini melibatkan tindakan yang melebihi standar mutu lingkungan hidup atau menyebabkan kerugian pada manusia atau lingkungan. Sanksi pidana bisa berupa pidana penjara dan denda, serta tindakan tambahan seperti perampasan keuntungan, penutupan usaha, atau pemulihan lingkungan. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku menuju praktik yang lebih ramah lingkungan (Rozi, 2018:46). Sanksi pidana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 120 UU

PPLH. Prosedur pengaduan dan penanganan kasus juga diatur dalam UU PPLH. Masyarakat atau korban dapat melaporkan dugaan pencemaran lingkungan kepada pihak berwenang. Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengajukan pengaduan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Pasal 68 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan tindakan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Marfiansyah, 2023).

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah, melalui berbagai lembaga terkait, harus bekerja sama untuk memastikan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang efektif (Mutmainah et al, 2024:384). Pasal 63 UU PPLH menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengaduan. Pasal 44 UU PPLH mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi mengenai lingkungan hidup kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini memberikan hak-hak penting bagi korban, termasuk ganti rugi materiil dan immateriil, rehabilitasi, dan pemulihan. Pelaku pencemaran diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bariun, L.O. (2019). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press.
- Ananta, F., et al. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 2(1).
- Fadhillah, H., et al. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Internasional, Diplomasi, dan Hubungan Internasional*, 5(2).
- Janis, Ignatius K. (2016). Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 5(5).
- Kurniawan, A., et al. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2).
- Memah, Henry R., et al. (2020). Penerapan Sanksi Administrasi dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 8(3)
- Mutmainah, Dini M., et al. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. 2(2).
- Nur, Yudha N., et al. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2).
- Rahmadi. (2019). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Journals:
- Rozi, Fachrul. (2018). Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Jurnal Yuridis UNAJA, 1(2).
Samidu, et al. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Konawe Selatan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 13(1).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.